



## **Political Transformation and the Transition of Islamic Civilization from the Classical to the Modern Era, and Islam's Contribution to World Knowledge**

**Mardhatillah<sup>1</sup>, Duski Samad<sup>2</sup>, Firdaus<sup>3</sup>**

Email [mardhatillah@uinib.ac.id](mailto:mardhatillah@uinib.ac.id) , [duskisamad@gmail.com](mailto:duskisamad@gmail.com) , [firdaus\\_mamad@uinib.ac.id](mailto:firdaus_mamad@uinib.ac.id)

<sup>1</sup>Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

### **ABSTRACT**

This paper examines the transformation of Islamic politics and civilization from the classical period to the modern era, as well as the contributions of Islam to the development of global knowledge. In the classical period, Islamic civilization was characterized by strong political institutions, intellectual openness, and the integration of religious and rational sciences, which enabled significant advancements in science, medicine, philosophy, and social thought. However, internal political fragmentation, external pressures, and colonial domination led to the decline of Islamic political power and intellectual influence. The modern period marks a phase of transformation in which Muslim societies faced the challenges of modernization, Western influence, and the reconfiguration of political and intellectual frameworks. Despite these challenges, Islam continued to contribute to global knowledge through its rich scientific heritage, methodological approaches, and ethical perspectives. The transmission of Islamic knowledge to Europe played a crucial role in shaping modern science and the Renaissance. This study highlights that the transformation from classical to modern Islamic civilization reflects both continuity and change, demonstrating the enduring relevance of Islamic intellectual traditions in the contemporary world.

**Keywords: Islamic civilization, political transformation, classical and modern Islam, knowledge contribution, intellectual history.**

### **PENDAHULUAN**

Masa klasik dikenal sebagai masa keemasan Islam (*Golden Age*), ketika dunia Islam menjadi pusat peradaban global. Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan petunjuk bagi umat manusia untuk membangun peradaban yang berlandaskan keimanan dan keadilan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 11:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ  
artinya: “sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (Q.S. Ar-Ra'd :11).

Ayat ini menjelaskan bahwa perubahan dan kemajuan suatu peradaban sangat bergantung pada usaha manusia dalam memperbaiki diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, kebangkitan dan kemunduran peradaban islam pada hakikatnya merupakan hasil dari dinamika internal umat islam itu sendiri.

Namun, kejayaan tersebut tidak berlangsung lama. Setelah abad ke 13 Masehi, peradaban islam mulai mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor internal, seperti konflik politik antar dinasti, melemahnya kepemimpinan khalifah, serta menurunnya semangat ilmiah dan moral umat islam.<sup>1</sup> Di sisi lain, fakto eksternal seperti serangan bangsa kolonialisme Eropa mempercepat kemerosotan dunia Islam. Sejak saat itu, umat islam kehilangan dominasi politik dan kemandirian ekonomi yang kemudian berdampak pada melemahnya posisi dunia Islam di kancah internasional.

Memasuki masa modern, umat islam dihadapkan pada tantangan baru berupa kemajuan sains dan teknologi dari dunia Barat. Kontak dengan Barat membawa pengaruh besar terhadap tantangan sosial politik umat islam. Banyak negara Islam yang dijajah, sehingga nilai-nilai dan sistem pemerintahan islam mengalami pergeseran. Kondisi ini menimbulkan kesadaran di kalangan pemikir ulama islam untuk melakukan pembaruan (*tajdid*) dalam berbagai aspek kehidupan agar islam tetap releban di tengah perubahan zaman.<sup>2</sup> Upaya pembaruan tersebut menandai awal transformasi politik dan peradaban islam dari masa klasik ke masa modern.

Tranformasi politik yang terjadi pada masa modern juga ditandai dengan lahirnya sistem pemerintahan baru berbentuk negara-bangsa (*Nation-State*). Sistem ini menggantikan konsep kekhalifan yang sebelumnya menjadi simbol persatuan umat islam. Meskipun sebagian pihak menganggap hal ini sebagai bentuk sekularisasi, namun sebagian lainnya menilai sistem tersebut merupakan adaptasi terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai islam.<sup>3</sup> Kajian tentang transformasi politik dan peradaban islam dari masa klasik ke masa modern menjadi penting karena memberikan pemahaman mengenai bagaimana islam merespons tantangan modernitas. Pemahaman ini juga menjadi dasar bagi umat islam masa kini untuk mengambil pelajaran dari sejarah agar tidak terjebak dalam konflik yang sama seperti masa lalu.<sup>4</sup> Sejarah menunjukkan bahwa islam selalu mampu beradaptasi dengan perubahan, selama nilai-nilai dasarnya tetap dijaga dan diterapkan secara kontekstual. Oleh karena itu, mengkaji transformasi ini tidak hanya penting secara historis, tetapi juga relevan untuk membangun arah peradaban islam masa depan yang berkemajuan dan berkeadilan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan, baik berupa buku-buku klasik dan kontemporer, artikel jurnal ilmiah, maupun dokumen sejarah yang membahas transformasi politik dan peradaban Islam dari periode klasik hingga modern serta kontribusi Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan cara membaca, mencatat, dan mengkaji secara kritis sumber-sumber yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan historis dan analitis, yaitu dengan menelusuri perkembangan peristiwa dan pemikiran dalam konteks sosial, politik, dan budaya pada masing-masing periode sejarah, serta membandingkan dinamika perubahan yang terjadi dari masa klasik ke masa modern.

Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan pola kesinambungan dan perubahan dalam peradaban Islam serta kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan dunia. Metode ini dipilih agar penelitian mampu memberikan pemahaman yang komprehensif dan sistematis mengenai transformasi peradaban Islam dan relevansinya dalam

<sup>1</sup> Ahmad Syalabi, *sejarah dan kebudayaan islam jilid I* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 45

<sup>2</sup> Nurcholish Majdid, *Islam Kemandirian dan Keindonesiaan* (Bandung : Mizan, 1992), hlm. 67

<sup>3</sup> Hasan hanafi, *Islam dan Modernitas : Dari Refleksi ke Aksi* (Jakarta : Paramadina, 2003), hlm. 53

<sup>4</sup> Badri Yatim, *Sejarah peradaban Islam* (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2012), hlm. 88



konteks kontemporer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi politik dan peradaban Islam dari periode klasik ke periode modern berlangsung melalui proses yang kompleks dan bertahap. Pada masa klasik, peradaban Islam ditandai oleh stabilitas politik relatif, kuatnya lembaga pemerintahan, serta berkembangnya tradisi keilmuan yang terintegrasi antara ilmu agama dan ilmu rasional. Kondisi ini memungkinkan lahirnya berbagai pencapaian intelektual yang berkontribusi signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.

Memasuki fase kemunduran, penelitian ini menemukan bahwa fragmentasi politik, konflik internal, serta tekanan eksternal, termasuk kolonialisme Barat, berdampak langsung terhadap melemahnya institusi politik dan pendidikan Islam. Kemunduran tersebut tidak hanya memengaruhi kekuatan politik umat Islam, tetapi juga menyebabkan stagnasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menurunnya peran dunia Islam dalam percaturan intelektual global.

Pada periode modern, hasil penelitian menunjukkan adanya upaya transformasi dan pembaruan dalam dunia Islam sebagai respons terhadap tantangan modernitas. Reformasi politik, munculnya gerakan pembaruan pemikiran Islam, serta usaha integrasi antara tradisi keilmuan Islam dan ilmu pengetahuan modern menjadi ciri utama periode ini. Meskipun menghadapi berbagai kendala struktural dan ideologis, dunia Islam menunjukkan upaya untuk menghidupkan kembali tradisi intelektualnya.

Penelitian ini juga menemukan bahwa kontribusi Islam terhadap ilmu pengetahuan dunia bersifat fundamental dan lintas disiplin. Berbagai konsep, metode ilmiah, dan karya ilmuwan Muslim pada masa klasik menjadi fondasi penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern, khususnya di Eropa. Transfer ilmu pengetahuan dari dunia Islam ke Barat berperan besar dalam membentuk tradisi ilmiah modern, termasuk dalam bidang sains, kedokteran, filsafat, dan ilmu sosial.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa transformasi peradaban Islam dari klasik ke modern mencerminkan dinamika kesinambungan dan perubahan. Meskipun mengalami kemunduran politik, warisan intelektual Islam tetap memiliki relevansi dan potensi untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban global di era kontemporer.

### Pembahasan

#### A. Sejarah Transformasi Politik dan Peradaban Islam Masa Klasik ke Modern

##### 1. *Pekembangan Politik Masa Khulafaur Rasyidin (632 M-661 M)*

Setelah wafatnya Rasulullah SAW pada tahun 632 M, umat Islam menghadapi tantangan besar dalam menentukan arah kepemimpinan dan sistem pemerintahan. Masa Khulafaur Rasyidin (632–661 M) menjadi periode penting dalam sejarah Islam karena pada masa inilah terbentuk dasar-dasar pemerintahan Islam yang bercirikan keadilan, musyawarah (syura), dan tanggung jawab sosial. Sistem pemerintahan pada masa ini dikenal sebagai bentuk pemerintahan khalifah, yaitu sistem kepemimpinan yang melanjutkan tugas Rasulullah dalam memelihara agama dan mengatur urusan dunia berdasarkan syariat Islam.<sup>5</sup> Khalifah berfungsi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan pemimpin umat yang berkewajiban menegakkan hukum Islam (syariat), menjaga keamanan, serta menyejahterakan rakyat.

##### a) Konsep Dasar Pemerintahan Khilafah

Khilafah dalam Islam bersifat kolektif dan bermusyawarah. Pemimpin tidak ditentukan melalui warisan, melainkan melalui mekanisme bai'at atau persetujuan

<sup>5</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 12

masyarakat. Proses pemilihan khalifah pertama, Abu Bakar ash-Shiddiq, dilakukan melalui musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah antara kaum Muhajirin dan Anshar.

Prinsip-prinsip dasar pemerintahan Islam yang ditegakkan masa itu antara lain:

- 1) Syura (Musyawarah) - Setiap keputusan penting diambil melalui musyawarah antara pemimpin dan umat.
  - 2) Keadilan ('Adl) - Pemerintahan wajib menjamin keadilan bagi seluruh warga tanpa membedakan agama, suku, atau status sosial.
  - 3) Amanah - Kepemimpinan dianggap sebagai tanggung jawab besar yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.
  - 4) Ketaatan terhadap hukum Allah - Semua kebijakan negara harus berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah.
- b) Struktur Pemerintahan

Struktur pemerintahan pada masa Khulafaur Rasyidin bersifat sederhana namun efektif. Khalifah berada di posisi tertinggi sebagai kepala pemerintahan. Di bawahnya terdapat beberapa lembaga dan pejabat yang membantu pelaksanaan administrasi negara, di antaranya:

- 1) Wazir (Pembantu atau Penasehat Khalifah)  
Jabatan wazir belum formal seperti masa dinasti, namun para khalifah memiliki sahabat-sahabat senior yang menjadi penasihat, seperti Umar bin Khattab bagi Abu Bakar, dan Ali bin Abi Thalib bagi Umar.
- 2) Gubernur (Amil atau Wali)  
Para gubernur memimpin wilayah administrasi di luar Madinah. Mereka bertugas mengumpulkan zakat, menjaga keamanan, dan melaksanakan hukum Islam. Para gubernur wajib menyampaikan laporan langsung kepada khalifah.
- 3) Qadhi (Hakim)  
Lembaga kehakiman bersifat independen dan tidak tunduk pada kekuasaan politik. Khalifah Umar bin Khattab bahkan menulis piagam bagi hakim agar menegakkan keadilan tanpa takut kepada penguasa.
- 4) Baitul Mal (Perbendaharaan Negara)  
Baitul Mal didirikan untuk mengelola keuangan negara, seperti zakat, jizyah, kharaj, dan ghanimah. Hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat.
- 5) Majelis Syura  
Beranggotakan para sahabat terkemuka yang berperan memberikan nasihat dan pertimbangan dalam masalah politik, hukum, dan kebijakan publik.

Struktur ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin sudah memiliki unsur pembagian kekuasaan, meskipun belum dalam bentuk birokrasi kompleks. Namun, setiap lembaga memiliki fungsi yang jelas dan saling mengawasi, sehingga pemerintahan berjalan secara adil dan efisien.

- c) Prinsip Akuntabilitas dan Pengawasan

Salah satu keunggulan pemerintahan Islam awal adalah adanya mekanisme pengawasan publik terhadap pemimpin. Rakyat memiliki hak untuk menegur atau mengkritik khalifah. Dalam salah satu peristiwa, ketika Khalifah Umar bin Khattab menetapkan batas mahar pernikahan, seorang perempuan menentangnya dengan dalil Al-Qur'an, dan Umar pun menarik kembali kebijakannya.<sup>6</sup> Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, keadilan dan kebenaran tidak monopoli penguasa.

Selain itu, para khalifah hidup sederhana dan menolak kemewahan. Mereka tidak menerima gaji besar atau fasilitas istimewa. Prinsip kesetaraan ini menjaga jarak antara

<sup>6</sup> Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 1985), hlm .63

pemimpin dan rakyat, menciptakan rasa kepercayaan dan keharmonisan sosial.

d) Signifikansi Sistem Pemerintahan Khulafaur Rasyidin

Sistem pemerintahan yang dibangun oleh Khulafaur Rasyidin menjadi model ideal bagi umat Islam sepanjang sejarah. Keempat khalifah menegakkan pemerintahan berdasarkan syariat, syura, dan keadilan sosial. Mereka mempraktikkan konsep imamah dalam arti kepemimpinan moral dan spiritual, bukan sekadar kekuasaan politik.

Model pemerintahan ini kemudian menjadi inspirasi bagi para pemikir Islam klasik seperti Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah* dan Al-Farabi dalam *Ara' Ahl al-Madinah al-Fadhilah*. Dalam pandangan mereka, pemerintahan yang adil adalah pemerintahan yang menegakkan hukum Allah dan menyejahterakan umat.

Dengan demikian, masa Khulafaur Rasyidin bukan hanya transisi politik setelah wafatnya Rasulullah, tetapi juga fondasi peradaban Islam yang berpijak pada nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial.

2. *Perkembangan Politik Masa Dinasti*

a) *Dinasti Umayyah (661-750 M)*

Dinasti Umayyah berdiri setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin, dengan Mu'awiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah pertama. Perkembangan politik yang paling menonjol pada masa ini adalah perubahan sistem pemerintahan dari prinsip musyawarah (syura) menjadi sistem monarki turun-temurun. Kekuasaan politik terpusat pada keluarga Umayyah dengan Damaskus sebagai ibu kota pemerintahan.<sup>7</sup>

Dalam bidang politik dan administrasi, Dinasti Umayyah membangun struktur pemerintahan yang relatif stabil dan terorganisir. Wilayah kekuasaan Islam dibagi ke dalam beberapa provinsi yang dipimpin oleh gubernur, serta didukung oleh kekuatan militer yang kuat. Selain itu, penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi negara memperkuat identitas politik Islam dan mempermudah pengelolaan wilayah yang sangat luas.<sup>8</sup>

Namun, perkembangan politik Dinasti Umayyah juga diwarnai berbagai tantangan. Ketidakpuasan kelompok Syiah, Khawarij, serta kaum mawali (non-Arab Muslim) terhadap kebijakan diskriminatif Umayyah memicu konflik politik yang berkepanjangan. Perselisihan internal keluarga Umayyah turut memperlemah legitimasi kekuasaan, hingga akhirnya dinasti ini runtuh akibat revolusi Abbasiyah pada tahun 750 M.<sup>9</sup>

b) *Dinasti Abbasiyah (750-1258 M)*

Dinasti Abbasiyah berdiri setelah berhasil menggulingkan Dinasti Umayyah melalui gerakan revolusi yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat, terutama kaum mawali. Dinasti ini mengklaim legitimasi politiknya sebagai keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad saw. Ibu kota pemerintahan dipindahkan ke Baghdad, yang kemudian berkembang menjadi pusat politik dan peradaban Islam.<sup>10</sup>

Pada masa awal pemerintahan, Dinasti Abbasiyah menerapkan sistem politik yang lebih inklusif. Kekuasaan tidak lagi didominasi oleh bangsa Arab, melainkan melibatkan berbagai etnis seperti Persia dan Turki. Struktur birokrasi negara berkembang pesat dengan munculnya jabatan wazir dan lembaga diwan, yang memperkuat administrasi pemerintahan pusat.<sup>11</sup>

Namun, pada periode selanjutnya, kekuasaan politik Abbasiyah mengalami

<sup>7</sup> Badri Yatim, hlm 41-43

<sup>8</sup> Philip K. Hitti. *History of the Arabs*. (London : Macmillan Press, 2002), hlm 210-215

<sup>9</sup> Marshall G. S. Hodgson. *The Venture of Islam*, Vol. I (Chicago: University of Chicago Press, 1874), hlm 240-245.

<sup>10</sup> Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies* (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), hlm. 78-82.

<sup>11</sup> Nasution, hlm. 56-59.



kemunduran. Munculnya dinasti-dinasti kecil yang otonom, seperti Dinasti Buwaihiyah dan Seljuk, menyebabkan khalifah Abbasiyah kehilangan kekuasaan politik secara nyata dan hanya berfungsi sebagai simbol keagamaan. Kondisi ini terus berlanjut hingga Baghdad ditaklukkan oleh bangsa Mongol pada tahun 1258 M.<sup>12</sup>

### 3. *Dinasti Fathimiyah (909-1171 M)*

Setelah melemahnya kekuasaan Abbasiyah, muncul banyak Kerajaan regional yang memiliki sistem politik masing-masing. Kerajaan Fatimiyah di Mesir berkembang dengan ideologi Syiah Ismailiyah dan membangun administrasi politik yang kuat. Fathimiyah berdiri di Ifriqiyah (Tunisia modern) tahun 909 M oleh 'Ubaidillah al-Mahdi setelah kelompok Ismailiyah berhasil menggulingkan Dinasti Aghlabiyah.<sup>13</sup> Pada periode awal ini, fokus utama pemerintahan adalah menstabilkan wilayah Afrika Utara, memperluas pengaruh, serta menata struktur politik berbasis imamah. Namun, masa ini juga diwarnai oleh perlawanan lokal seperti pemberontakan suku Berber dan konflik dengan kerajaan Abbasiyah di Timur. Meski demikian, Fathimiyah berhasil mempertahankan eksistensinya dan memperkuat fondasi politiknya.

Dinasti Fathimiyah menerapkan pemerintahan teokratis, di mana khalifah juga dianggap sebagai imam yang memiliki otoritas spiritual. Sistem ini membedakan Fathimiyah dari Abbasiyah, yang hanya mengklaim otoritas politik.<sup>14</sup> Khalifah Fathimiyah memegang kekuasaan absolut atas politik, militer, agama, dan ekonomi. Pemerintahan didukung oleh wazir, qadhi, serta pejabat administrasi yang mengelola birokrasi negara. Selain itu, lembaga dakwah Ismailiyah memainkan peran penting dalam legitimasi politik dan penyebaran ideologi dinasti.<sup>15</sup>

### 4. *Dinasti Ayyubiyah (117-1250)*

Dinasti Ayyubiyah didirikan oleh Salahuddin al-Ayyubi setelah berhasil mengakhiri kekuasaan Dinasti Fatimiyah di Mesir. Dinasti ini berlandaskan ideologi Sunni dan berupaya mengembalikan otoritas politik Islam Sunni di wilayah Mesir, Syam, dan sekitarnya. Salahuddin dikenal sebagai pemimpin yang berhasil menyatukan kekuatan politik Islam untuk menghadapi ancaman eksternal, terutama Perang Salib.<sup>16</sup>

Secara politik, Dinasti Ayyubiyah menerapkan sistem pemerintahan yang bersifat federatif. Wilayah kekuasaan dibagi kepada anggota keluarga Ayyubiyah sebagai penguasa daerah, namun tetap berada di bawah otoritas sultan. Sistem ini membantu menjaga stabilitas politik, meskipun di sisi lain membuka peluang konflik internal antar anggota keluarga.<sup>17</sup>

Puncak kejayaan politik Dinasti Ayyubiyah ditandai dengan keberhasilan merebut kembali Yerusalem dari tentara Salib pada tahun 1187 M. Namun, setelah wafatnya Salahuddin, kekuasaan politik Ayyubiyah melemah akibat persaingan internal dan akhirnya digantikan oleh Dinasti Mamluk pada pertengahan abad ke-13.<sup>18</sup>

## B. Masa Kemunduran Politik dan Peradaban Islam

### 1. *Dinasti Mamluk di Mesir dan Suriah (1250-1517 M)*

Dinasti Mamluk pernah memainkan peran strategis dalam menjaga stabilitas dunia Islam, terutama melalui keberhasilannya mengalahkan pasukan Mongol di Ain Jalut dan

<sup>12</sup> Hugh Kennedy, *The Prophet and the Age of the Caliphates* (London : Routledge, 2016), hlm. 198-205.

<sup>13</sup> Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), hlm. 67.

<sup>14</sup> Bernard Lewis, *The Middle East: A Brief History of the Last 2,000 Years*, (New York: Scribner, 1995), hlm. 131.

<sup>15</sup> Farhad Daftary, *The Ismailis: Their History and Doctrines*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), hlm. 172.

<sup>16</sup> Carole Hillenbrand, *The Crusades : Islamic Perspectives* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1999), hlm. 328-332.

<sup>17</sup> Ahmad Syalabi, *Sejarah Kebudayaan Islam* (Jakarta : Pustaka al-Husna, 1993), hlm. 189-192.

<sup>18</sup> Ira M. Lapidus, hlm. 115-118.



mengusir tentara Salib dari wilayah Syam dan Mesir.<sup>19</sup> Namun, setelah mencapai puncak kejayaan tersebut, Dinasti Mamluk secara bertahap mengalami kemunduran politik yang serius.

Salah satu faktor utama kemunduran adalah lemahnya sistem suksesi kepemimpinan, di mana pergantian sultan sering kali dilakukan melalui kudeta militer dan perebutan kekuasaan di antara elite Mamluk.<sup>20</sup> Kondisi ini menciptakan instabilitas politik yang berkelanjutan dan melemahkan otoritas pemerintahan pusat. Akibatnya, kebijakan negara menjadi tidak konsisten dan sering berganti sesuai kepentingan penguasa yang berkuasa dalam waktu singkat.

Dari sisi peradaban, Dinasti Mamluk mengalami stagnasi intelektual. Meskipun tetap menjadi pusat keilmuan Islam, khususnya dalam bidang fikih dan hadis, inovasi dalam sains dan teknologi relatif terhambat. Ketertinggalan dalam teknologi persenjataan membuat Mamluk tidak mampu menghadapi kekuatan militer Usmaniyah yang telah mengadopsi senjata api secara lebih maju. Kekalahan dari Usmaniyah pada tahun 1517 M menandai berakhirnya kekuasaan politik Dinasti Mamluk.

## 2. Kesultanan Delhi di India (1206-1526 M)

Kesultanan Delhi merupakan salah satu kekuasaan Islam terpenting di anak benua India sebelum munculnya Kesultanan Mughal. Namun, kemunduran politiknya disebabkan oleh ketidakstabilan pemerintahan dan konflik internal antardinasti, seperti Dinasti Mamluk, Khalji, Tughlaq, Sayyid, dan Lodi<sup>6</sup>. Pergantian penguasa yang sering menyebabkan lemahnya otoritas pusat dan menurunnya kepercayaan rakyat.

Selain konflik internal, Kesultanan Delhi menghadapi tantangan eksternal yang berat. Invasi Timur Lenk pada akhir abad ke-14 M menyebabkan kerusakan besar pada kota Delhi dan melemahkan struktur ekonomi serta administrasi negara. Kondisi ini memperparah krisis politik dan mempercepat proses disintegrasi kekuasaan.

Dalam bidang peradaban, meskipun Kesultanan Delhi memberikan kontribusi penting dalam penyebaran Islam dan kebudayaan Islam di India, ketegangan sosial antara penguasa Muslim dan mayoritas penduduk non-Muslim menjadi tantangan tersendiri.<sup>21</sup> Ketidakmampuan pemerintah mengelola keragaman sosial dan budaya secara efektif turut memperlemah stabilitas politik. Pada akhirnya, Kesultanan Delhi runtuh setelah dikalahkan oleh Babur pada tahun 1526 M.

## 3. Kesultanan Granada di Andalusia (1238-1492 M)

Kesultanan Granada merupakan kerajaan Islam terakhir di Andalusia yang bertahan hingga akhir abad ke-15 M. Kemunduran Granada tidak dapat dilepaskan dari perpecahan internal di kalangan elite penguasa Bani Ahmar, yang melemahkan persatuan politik umat Islam di wilayah tersebut. Konflik internal ini dimanfaatkan oleh kerajaan-kerajaan Kristen Spanyol untuk melancarkan tekanan politik dan militer secara berkelanjutan.

Dari segi politik luar negeri, Granada berada dalam posisi yang sangat lemah karena ketergantungannya pada perjanjian damai dengan kerajaan Kristen Castile dan Aragon. Ketergantungan ini mengurangi kedaulatan politik dan mempersempit ruang gerak diplomasi Granada. Meskipun demikian, secara peradaban Granada masih menunjukkan kemajuan dalam seni, arsitektur, dan sastra Islam, yang tercermin dalam pembangunan Istana Alhambra. Namun, keunggulan budaya ini tidak mampu mengimbangi kelemahan politik dan militer. Penyerahan Granada pada tahun 1492 M menandai berakhirnya kekuasaan Islam di Andalusia dan menjadi simbol kemunduran

<sup>19</sup> Badri Yatim, hlm. 141-143.

<sup>20</sup> Hugh Kennedy, hlm. 312-314.

<sup>21</sup> Philip, hlm. 561-564.



peradaban Islam di Eropa Barat.<sup>22</sup>

#### 4. Dinasti Usmaniyah/Ottoman (1299-1922 M)

Dinasti Usmaniyah (1299–1924 M) merupakan salah satu kekaisaran Islam terbesar dan terlama dalam sejarah. Namun, sejak abad ke-17 M, Dinasti Usmaniyah mulai mengalami kemunduran politik akibat melemahnya sistem administrasi, korupsi birokrasi, dan menurunnya disiplin militer.<sup>23</sup> Sistem pemerintahan yang sebelumnya efektif menjadi kurang responsif terhadap perubahan zaman.

Selain faktor internal, Dinasti Usmaniyah menghadapi tantangan eksternal berupa kemajuan pesat negara-negara Eropa dalam bidang teknologi, ekonomi, dan militer.<sup>24</sup> Keteringgalan dalam inovasi ilmu pengetahuan dan resistensi terhadap pembaruan memperlemah daya saing Usmaniyah di tingkat global. Dalam bidang peradaban, stagnasi intelektual dan lemahnya lembaga pendidikan menyebabkan kontribusi ilmiah Usmaniyah tidak berkembang sepesat periode sebelumnya. Bangkitnya nasionalisme di wilayah-wilayah kekuasaan serta campur tangan politik Barat semakin mempercepat proses disintegrasi kekaisaran. Pembubaran institusi kekhalifahan pada tahun 1924 M menandai berakhirnya kekuasaan politik Usmaniyah.

#### 5. Kesultanan Mughal di India (1526-1857 M)

Kesultanan Mughal mencapai puncak kejayaan pada masa Akbar, Jahangir, dan Shah Jahan dengan sistem administrasi yang kuat serta kemajuan seni dan arsitektur.<sup>25</sup> Namun, kemunduran mulai tampak pada masa pemerintahan Aurangzeb akibat kebijakan politik yang keras dan konflik berkepanjangan dengan kelompok-kelompok lokal.

Setelah wafatnya Aurangzeb, Kesultanan Mughal menghadapi krisis kepemimpinan yang serius. Perebutan tahta, melemahnya ekonomi, dan meningkatnya pemberontakan daerah menyebabkan kekuasaan politik Mughal semakin menyempit. Campur tangan Inggris melalui East India Company semakin mempercepat runtuhnya kedaulatan politik Mughal.

Dalam bidang peradaban, kemunduran politik berdampak langsung pada melemahnya patronase terhadap ilmu pengetahuan dan seni. Pada abad ke-19 M, Kesultanan Mughal runtuh sepenuhnya dan India berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris, menandai berakhirnya salah satu kekuatan besar Islam di Asia Selatan.

### C. Faktor-faktor Kemunduran Politik Islam

#### a) Perpecahan Politik dan Disintegrasi

Kekuasaan Setelah masa kejayaan Abbasiyah, kekuasaan politik Islam mulai terpecah-pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang berdiri sendiri. Hal ini melemahkan kekuatan politik Islam secara keseluruhan. Munculnya dinasti-dinasti seperti Fathimiyah di Mesir, Umayyah di Andalusia, dan Seljuk di Persia menjadi tanda berkurangnya otoritas khalifah Abbasiyah.<sup>26</sup>

#### b) Kemunduran Kepemimpinan dan Moral Penguasa

Banyak khalifah pada masa akhir Abbasiyah lebih mementingkan kemewahan dan kehidupan istana daripada memperhatikan rakyat dan pemerintahan. Ketidakmampuan mereka dalam mengelola negara menyebabkan munculnya konflik internal dan perebutan kekuasaan di antara para bangsawan serta pejabat istana.<sup>27</sup>

#### c) Serangan dari Mongol

Serangan Mongol Pada abad ke-13, bangsa Mongol di bawah kepemimpinan Jenghis

<sup>22</sup> Karen Armstrong, *Islam : A Short History* (London : Phoenix Press, 2002), hlm. 170-173.

<sup>23</sup> Stanford J. Shaw, *History of the Ottoman Empire and Modern Turkey*, Vol. I (Cambridge: Cambridge University Press, 1976), hlm. 170-173.

<sup>24</sup> Bernard Lewis, *The Emergence of Modern Turkey* (Oxford: Oxford University Press, 2001), hlm 45-48.

<sup>25</sup> Francis Robinson, *The Mughal Emperors* (London: Thames & Hudson, 1993), hlm. 52-55.

<sup>26</sup> Nasution, hlm 87

<sup>27</sup> Yatim, hlm. 162



Khan dan keturunannya melakukan ekspansi besar-besaran dari Asia Timur. Cucunya, Hulagu Khan, memimpin pasukan Mongol menyerang wilayah-wilayah Islam di Asia Barat. Invasi ini merupakan salah satu tragedi terbesar dalam sejarah Islam. Pada tahun 1258 (Jatuhnya Baghdad), pasukan Hulagu Khan mengepung dan menghancurkan Baghdad, ibu kota Kekhalifahan Abbasiyah. Khalifah Al-Musta'sim, khalifah terakhir Abbasiyah, dibunuh bersama ribuan penduduk kota. Perpustakaan besar Baghdad, rumah bagi jutaan manuskrip ilmiah dan literatur, dibakar dan dilemparkan ke Sungai Tigris hingga airnya konon berubah hitam karena tinta.<sup>28</sup>

#### D. Gerakan Pembaruan dan Kebangkitan Islam Pada Abad Ke 19 dan 20

##### 1. Latar Belakang Gerakan Pembaruan

Gerakan pembaruan Islam muncul sebagai respons terhadap kondisi kemunduran umat Islam yang terjadi sejak abad ke-18 hingga awal abad ke-20. Pada masa tersebut, dunia Islam mengalami kemerosotan dalam berbagai bidang: politik, ekonomi, sosial, maupun intelektual. Sementara itu, dunia Barat mengalami kemajuan pesat melalui revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi yang kemudian melahirkan kekuatan kolonialisme.<sup>29</sup> Kemunduran umat Islam ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain lemahnya kepemimpinan politik, keterbelakangan pendidikan, dan hilangnya semangat ijtihad dalam memahami ajaran agama. Banyak masyarakat Islam pada masa itu lebih mengedepankan taklid buta, yaitu mengikuti pendapat ulama masa lalu tanpa melakukan kajian kritis terhadap sumber ajaran Islam. Selain itu, muncul pula berbagai praktik bid'ah dan khurafat yang menyebabkan pemahaman agama menjadi kaku dan menjauh dari nilai-nilai asli Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>30</sup>

Di sisi lain, bangsa-bangsa Eropa yang sebelumnya tertinggal dari peradaban Islam, mulai bangkit melalui renaissance dan revolusi industri, yang mendorong kemajuan dalam sains, teknologi, dan militer. Kondisi ini membuat banyak wilayah Islam jatuh ke tangan kolonial Barat seperti Inggris, Prancis, dan Belanda. Akibatnya, muncul kesadaran di kalangan intelektual Muslim bahwa kemunduran umat bukan karena ajaran Islam itu sendiri, melainkan karena umat Islam meninggalkan nilai-nilai ajaran yang sejati.

Gerakan pembaruan Islam bertujuan untuk mengembalikan umat kepada sumber pokok ajaran Islam (Al-Qur'an dan Hadis) dengan semangat ijtihad serta menyesuaikan Islam dengan tantangan modernitas. Para pembaru juga berusaha memperbaiki sistem pendidikan, hukum, dan pemerintahan agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam sekaligus relevan dengan perkembangan zaman.<sup>31</sup> Dengan demikian, gerakan pembaruan Islam tidak hanya bersifat keagamaan, tetapi juga sosial dan politik. Ia berperan penting dalam membangkitkan kesadaran umat Islam terhadap pentingnya kemajuan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kemandirian umat untuk melawan penjajahan.<sup>32</sup>

##### 2. Karakteristik Umum Gerakan Pembaruan Islam

Gerakan pembaruan Islam pada periode ini memiliki beberapa karakteristik utama.

- a) Adanya seruan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam dengan pemahaman rasional dan kontekstual
- b) Penolakan terhadap taklid buta serta dorongan untuk menghidupkan kembali ijtihad dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer.
- c) Adanya upaya untuk mendamaikan ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan dan teknologi

<sup>28</sup> Sundari, I., Ritonga, A. H., & Nasution, A. (2024). Kemunduran Dinasti Abbasiyah dan Dampak Invasi Mongol Terhadap Peradaban Islam. *Râyah Al-Islâm : Jurnal Ilmu Islam*.

<sup>29</sup> Nasution, hlm 1

<sup>30</sup> Nurcholish Majdid, *Islam Kmodern dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 76

<sup>31</sup> Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 115

<sup>32</sup> Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante* (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 22



modern, dengan keyakinan bahwa kemajuan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

- d) Perhatian terhadap reformasi pendidikan, pembaruan sosial, dan kebangkitan kesadaran politik umat Islam sebagai respons terhadap penjajahan Barat.

### 3. Tokoh dalam Pemikiran Pembaru Islam

- a) Tokoh dan Gerakan Pembaruan Islam Abad ke-19

1) Muhammad bin Abdul Wahhab

Muhammad bin Abdul Wahhab (1703–1792 M) merupakan pelopor gerakan pemurnian Islam di Jazirah Arab. Ia menekankan pentingnya pemurnian tauhid dan penolakan terhadap praktik syirik, bid'ah, dan khurafat yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam murni. Gerakan ini kemudian berkembang menjadi kekuatan religius dan politik melalui kerja sama dengan keluarga Saud dan berpengaruh besar terhadap perkembangan Islam di Arab Saudi.

2) Jamaluddin al-Afghani

Jamaluddin al-Afghani (1838–1897 M) dikenal sebagai tokoh kebangkitan Islam yang menekankan pentingnya persatuan umat Islam (pan-Islamisme) dalam menghadapi imperialisme Barat.<sup>33</sup> Ia mendorong umat Islam untuk menguasai ilmu pengetahuan modern dan membangun kesadaran politik sebagai bagian dari upaya kebangkitan peradaban Islam.

3) Muhammad Abduh

Muhammad Abduh (1849–1905 M) merupakan tokoh pembaruan Islam yang menekankan rasionalitas dan pembaruan pemikiran keagamaan. Ia mengkritik praktik taklid dan mendorong pembukaan kembali pintu ijtihad. Melalui perannya di Al-Azhar, Abduh berupaya mereformasi sistem pendidikan Islam agar lebih relevan dengan perkembangan zaman.

- b) Gerakan Pembaruan dan Kebangkitan Islam Abad ke-20

1) Rashid Rida

Rashid Rida (1865–1935 M) melanjutkan gagasan Muhammad Abduh melalui majalah Al-Manar. Ia mengembangkan pemikiran pembaruan dengan menekankan pentingnya penerapan ajaran Islam dalam kehidupan sosial dan politik, serta perlunya pembentukan pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

2) Hasan al-Banna

Hasan al-Banna (1906–1949 M) mendirikan Ikhwanul Muslimin sebagai gerakan dakwah dan sosial-politik yang bertujuan membangkitkan kembali kehidupan Islam secara menyeluruh. Gerakan ini berupaya mengintegrasikan aspek akidah, ibadah, sosial, dan politik dalam satu kerangka Islam yang komprehensif.

3) Abul A'la al-Maududi

Abul A'la al-Maududi (1903–1979 M) merupakan tokoh pembaruan Islam di anak benua India yang menekankan konsep Islam sebagai sistem kehidupan yang menyeluruh (syumul).<sup>34</sup> Ia menekankan pentingnya pembentukan masyarakat dan negara yang berlandaskan nilai-nilai Islam sebagai solusi atas krisis modernitas.

### 4. Dampak Gerakan Pembaruan dan Kebangkitan Islam

Gerakan pembaruan dan kebangkitan Islam pada abad ke-19 dan 20 memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan pemikiran Islam modern. Gerakan ini berhasil membangkitkan kesadaran umat Islam akan pentingnya pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan, serta peran aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Selain itu, gerakan ini menjadi fondasi bagi lahirnya berbagai organisasi Islam modern di berbagai negara Muslim.

<sup>33</sup> Albert Hourani, *Arabic Thought in the Liberal Age* (Cambridge: Cambridge University Press, 1983), hlm. 103-106.

<sup>34</sup> Fazlur Rahman, *Islam* (Chicago: University of Chicago Press, 1979), hlm. 241-244.

## E. Kontribusi Islam Terhadap Ilmu Pengetahuan Dunia

### 1. Landasan Ajaran Islam terhadap Ilmu Pengetahuan

Islam menempatkan ilmu pengetahuan sebagai bagian fundamental dalam kehidupan manusia. Al-Qur'an dan Hadis secara tegas mendorong umat Islam untuk mencari, mengembangkan, dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Perintah membaca dalam wahyu pertama menunjukkan bahwa pengembangan ilmu merupakan pintu utama peradaban Islam. Dalam pandangan Islam, ilmu tidak hanya bernilai intelektual, tetapi juga bernilai spiritual dan moral.

Islam juga memandang hubungan antara wahyu dan akal bersifat saling melengkapi. Wahyu memberikan pedoman nilai, sedangkan akal digunakan untuk memahami alam semesta dan realitas sosial. Pandangan ini melahirkan tradisi keilmuan yang rasional, kritis, dan terbuka terhadap pengembangan ilmu pengetahuan<sup>2</sup>.

### 2. Lembaga Keilmuan dalam Peradaban Islam

Kontribusi Islam terhadap ilmu pengetahuan dunia tercermin dari berkembangnya berbagai lembaga keilmuan. Masjid pada masa awal Islam berfungsi sebagai pusat pendidikan, diskusi ilmiah, dan transmisi ilmu. Seiring perkembangan peradaban, muncul madrasah, perpustakaan, dan pusat penelitian yang terorganisir.

Salah satu lembaga paling berpengaruh adalah Bait al-Hikmah di Baghdad, yang menjadi pusat penerjemahan karya-karya ilmiah Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Proses ini tidak hanya bersifat transfer ilmu, tetapi juga pengembangan dan penyempurnaan teori-teori ilmiah yang kemudian diwariskan kepada dunia Barat.

### 3. Kontribusi Islam dalam Bidang Matematika dan Astronomi

Dalam bidang matematika, ilmuwan Muslim memberikan sumbangan besar, terutama melalui pengembangan aljabar, aritmetika, dan trigonometri. Al-Khwarizmi dikenal sebagai tokoh utama yang meletakkan dasar ilmu aljabar dan memperkenalkan sistem angka desimal yang digunakan hingga kini.

Di bidang astronomi, ilmuwan Muslim mengembangkan observatorium, menyusun tabel astronomi, dan memperbaiki sistem penanggalan. Pengetahuan ini sangat berpengaruh dalam navigasi, penentuan waktu ibadah, serta perkembangan ilmu astronomi modern.

### 4. Kontribusi Islam dalam Ilmu Kedokteran dan Farmasi

Ilmuwan Muslim juga memberikan kontribusi besar dalam bidang kedokteran. Tokoh seperti Ibnu Sina dan Al-Razi menulis ensiklopedia medis yang digunakan selama berabad-abad di dunia Islam dan Eropa. Karya Al-Qanun fi al-Tibb karya Ibnu Sina menjadi rujukan utama di universitas-universitas Eropa hingga abad ke-17.

Selain itu, peradaban Islam telah mengembangkan rumah sakit (bimaristan) yang terorganisir, lengkap dengan sistem pendidikan kedokteran, farmasi, dan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat.

### 5. Kontribusi Islam dalam Ilmu Kimia dan Fisika

Dalam bidang kimia, ilmuwan Muslim seperti Jabir ibn Hayyan memperkenalkan metode eksperimen, distilasi, kristalisasi, dan penggunaan alat laboratorium. Pendekatan ilmiah berbasis eksperimen ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan kimia modern.

Dalam fisika dan optika, Ibnu al-Haytham mengembangkan teori cahaya dan penglihatan melalui pendekatan eksperimental. Karyanya tentang optika memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan ilmu fisika di Eropa.

### 6. Kontribusi Islam dalam Ilmu Sosial dan Humaniora

Kontribusi Islam tidak terbatas pada ilmu alam, tetapi juga mencakup ilmu sosial dan humaniora. Ibnu Khaldun melalui karyanya Muqaddimah meletakkan dasar ilmu sosiologi dan filsafat sejarah dengan pendekatan ilmiah terhadap masyarakat dan peradaban.

Dalam bidang geografi dan historiografi, ilmuwan Muslim menyusun peta, catatan perjalanan, serta metode penulisan sejarah yang kritis dan sistematis. Kontribusi ini memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dunia dan memengaruhi tradisi akademik Barat.<sup>35</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa transformasi politik dan peradaban Islam dari periode klasik ke periode modern merupakan proses historis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Pada masa klasik, Islam berhasil membangun peradaban yang kuat dengan sistem politik yang relatif stabil serta tradisi keilmuan yang integratif, sehingga melahirkan kontribusi besar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa hubungan harmonis antara wahyu dan akal menjadi fondasi utama perkembangan peradaban Islam.

Memasuki masa kemunduran, fragmentasi politik, konflik internal, serta tekanan kolonialisme menyebabkan melemahnya institusi politik dan pendidikan Islam, yang berdampak pada menurunnya peran dunia Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Namun demikian, warisan intelektual Islam tidak sepenuhnya hilang, melainkan tetap menjadi dasar penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern melalui proses transmisi ke dunia Barat.

Pada periode modern, dunia Islam menghadapi tantangan globalisasi dan modernitas yang mendorong munculnya berbagai upaya pembaruan dalam bidang politik, pemikiran, dan pendidikan. Transformasi ini mencerminkan adanya kesinambungan dan perubahan dalam peradaban Islam. Oleh karena itu, kontribusi Islam terhadap ilmu pengetahuan dunia tidak hanya bersifat historis, tetapi juga memiliki relevansi yang berkelanjutan. Revitalisasi tradisi keilmuan Islam dengan pendekatan yang kontekstual dan integratif menjadi langkah strategis untuk memperkuat peran umat Islam dalam pembangunan peradaban global di masa kini dan mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Armstrong, Karen. (2002). *Islam: A Short History*. London. Phoenix Press.
- Azra, Azyumardi. (2000). *Renaissance Islam Asia Tenggara : Sejarah, Ide, dan Gerakan*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Carole Hillenbrand. (1999). *The Crusades: Islamic Perspectives*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Rahman, Fazlur. (1979). *Islam*. Chicago: University of Chicago Press.
- Hanafi, Hasan. (2003). *Islam dan Modernitas : Dari Refleksi ke Aksi*. Jakarta. Paramadina.
- Hitti, Philip K. (2002). *History of the Arabs*. London: Macmillan Press.
- Hodgson, Marshall G. S. (1974). *The Venture of Islam*. Vol. II. Chicago: University of Chicago Press.
- Hourani, Albert. (1983). *Arabic Thought in the Liberal Age*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kennedy, Hugh. (2014). *Muslim Spain and Portugal: A Political History of al-Andalus*. London: Routledge.
- Kennedy, Hugh. (2016). *The Prophet and the Age of the Caliphates*. London: Routledge.
- Lapidus, Ira M. (2014). *A History of Islamic Societies*. Cambridge: Cambridge University Press,.
- Lewis, Bernard. (2002). *The Emergence of Modern Turkey*. Oxford: Oxford University Press.
- Majdid, Nurcholish. (1992). *Islam Kemandirian dan Keindonesiaan*. Bandung. Mizan.
- Marshall G. S. Hodgson. (1974). *The Venture of Islam*, Vol. I. Chicago: University of

<sup>35</sup> Badri Yatim, hlm. 110-112.



Chicago Press.

Nasution, Harun. (1985). *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press, 1985.

Nasution, Harun. (1996). *Pembaharuan dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Robinson, Francis. (1993). *The Mughal Emperors*. London: Thames & Hudson.

Shaw, Stanford J. (1976). *History of the Ottoman Empire and Modern Turkey*. Vol. I. Cambridge: Cambridge University Press.

Sjadzali, Munawir. (1990). *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta. UI Press.

Suryanegara, Mansur, Ahmad. (2018). *Api Sejarah : Mahakarya Peradaban Islam di Nusantara* Bandung. Surya Dinasti.

Syalabi, Ahmad. (2008). *Sejarah dan kebudayaan islam jilid I*. Jakarta. RajaGrafindo Persada

Syalabi, Ahmad. (1993). *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jakarta. Pustaka al-Husna.

Yatim, Badri. (2014). *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta. RajaGrafindo Persada.